

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

**Ida Ayu Indah Utami Dewi¹
Made Kembar Sri Budhi²
Wayan Sudirman³**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar, Bali
Email: dayuindah32@gmail.com

ABSTRAK

Perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah serta perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki wilayah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM (Sumber Daya Manusia) juga disebabkan dari faktor eksternal yakni ketimpangan pembangunan antar wilayah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, untuk mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, dan untuk mengetahui apakah hipotesis Kuznets tentang “U terbalik” berlaku di Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan data PDRB dari tahun 2002-2011, serta jumlah penduduk tahun 2002-2011. Teknik analisis dengan Analisis Tipologi Klassen, Analisis Indeks Williamson, Regresi Non Linier.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbagi dalam tiga pola yaitu : perekonomian Daerah yang maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung; daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng; daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Klungkung; dan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem. Indeks Williamson di Provinsi Bali berkisar pada nilai 0,68 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali tinggi. Hipotesis Kuznets tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U terbalik tidak berlaku di Provinsi Bali. Oleh karena pertumbuhan pendapatan per kapita selalu diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa sulit dihindari, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan maka dianjurkan kepada pemerintah memberikan subsidi lebih banyak kepada masyarakat secara langsung berupa “pembayaran transfer”, dan secara tidak langsung melalui subsidi pendidikan, penciptaan lapangan kerja, subsidi kesehatan, dan sebagainya.

Kata kunci : ketimpangan, PDRB, jumlah penduduk.

ABSTRACT

Level of income differences apart from internal is SDM also external factors resulting from the imbalance of development between regions , differences in the quantity and quality of natural resources owned by the region as well as differences in the quantity and quality infrastructure owned territory . This has to be one of the causes of inequality or the gap between regions . The purpose of the study is to examine the pattern and economic structure of the district / city in the province of Bali , to determine the effect of inequality on economic growth of economic development in the province of Bali , and to determine whether the Kuznets hypothesis of the " inverted U " effect in the province of Bali

This study used data from the years 2002-2011 GDP , as well as the population in 2002-2011 . Typology of analytical techniques with analysis Klassen , Williamson Index Analysis , Non Linear Regression .

The study results showed that the structure of economic growth in the District / City in the Province of Bali is divided into three patterns , namely : Regional economies are developed and fast growing , consisting of Badung regency ; rapidly growing area but not developed , namely Denpasar , Gianyar and Buleleng regency ; advanced areas but stressed the Klungkung regency , and the area behind the Tabanan , Jembrana , Bangli and Karangasem . Williamson index in Bali province revolves around the value of 0.68 which indicates that the degree of inequality in the development of high Bali Province . Kuznets hypothesis about the relationship between economic growth and development gaps inverted U -shaped curve is not applicable in the province of Bali . Because of the growth of income per capita is always expected to improve the welfare of society and changes in the economic structure from agriculture to industry and services are difficult to avoid , it is to create economic growth coupled with equity then it is advisable for the government to provide subsidies to the public more directly in the form " transfer payments " , and indirectly through job creation , education subsidy , healthcare subsidy , and so on

Keywords : inequality , GDP , population .

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketidakpuasan timbul akibat pengendalian pemerintah pusat terhadap pengalihan sumber daya alam di daerah serta kurang sensitifnya pemerintah terhadap perbedaan antar daerah. Permintaan yang kuat akan pembagian kewenangan ini kemudian memunculkan ketidakpuasan. Diperkuat oleh adanya krisis moneter dan pergolakan politik mulai tahun 1997

Di samping itu, pemberian otonomi kepada daerah sangat perlu untuk memperbesar partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia dalam memberikan keputusan yang berdampak langsung kepada daerahnya, sebab sangat tidak realistis Pemerintah Pusat membuat keputusan mengenai pelayanan masyarakat untuk seluruh wilayah negara. Demikian juga diyakini bahwa masyarakat lokal melalui Kabupaten/Kota memiliki pengetahuan yang lebih tentang kebutuhan, kondisi dan yang diprioritaskan. Mobilisasi sumberdaya lebih dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat yang dekat dengan pengambil keputusan di tingkat

lokal (Simanjuntak, 2000). Otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu penting yang paling mungkin setiap daerah mendinamisir kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-masing daerah (Yustika,2007).

Pemerintah daerah tidak perlu lagi harus tergantung pada pusat dalam menentukan kebijakan publik karena daerahlah yang sebenarnya mengetahui secara pasti kebutuhannya. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, membuat mereka merasa memiliki dan mau ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan yang berlangsung. Pada intinya, desentralisasi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian suatu negara, karena efisiensi lebih mudah jika suatu kegiatan dilakukan oleh tingkat pemerintah daerah yang lebih kecil, yang lebih mengenal kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya serta lebih mampu menanggapi permasalahan yang dihadapinya. Secara umum, efisiensi dan efektivitas yang diperoleh dari proses desentralisasi akan tercapai melalui pembagian tanggung jawab untuk berbagai jenis pelayanan publik kepada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan kelompok masyarakat yang memanfaatkan barang publik tersebut.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Lili Masli, 2008). Ekonomi suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat diharapkan pertumbuhan tersebut dapat dinikmati merata oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-Terbalik, dimana pada tahap-tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik.

Bali sebagai salah satu wilayah dengan sebaran yang cukup tinggi juga mengalami ketidakmerataan dalam percepatan pembangunan antar wilayahnya. Pembangunan yang dilakukan di wilayah bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya, namun juga untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain. Kabupaten di seluruh Indonesia semakin berusaha keras untuk membangun wilayahnya sejak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, yang menyerahkan otonomi sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Tabel 1.1
Jumlah PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2002-2009 (Jutaan Rupiah)

Kab / Kota	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Denpasar	3.529.565,61	3.717.099,69	3.933.893,16	4.171.800,20	4.417.091,13	4.708.517,88	5.029.895,33	5.358.246,42
Buleleng	2.245.178,15	2.353.845,68	2.470.981,98	2.609.344,01	2.748.899,07	2.908.760,60	3.078.504,42	3.266.342,62
Karangasem	1.256.536,29	1.307.380,75	1.366.090,41	1.436.224,88	1.505.163,65	1.583.407,93	1.663.749,20	1.747.169,48
Bangli	773.161,52	799.298,13	831.519,51	868.617,80	905.544,94	946.113,43	984.129,50	1.040.363,42

Klungkung	892.417,24	920.086,13	936.079,87	1.015.185,58	1.066.284,61	1.125.343,88	1.182.357,06	1.240.542,93
Gianyar	2.230.164,63	2.304.529,97	2.418.579,23	2.550.914,74	2.683.651,69	2.841.726,02	3.009.320,12	3.187.822,91
Badung	3.764.171,61	3.876.928,95	4.100.875,13	4.330.863,41	4.548.555,63	4.860.131,70	5.196.125,34	5.528.320,09
Tabanan	1.629.373,99	1.709.429,75	1.790.235,46	1.896.919,90	1.996.479,10	2.111.463,36	2.221.759,97	2.342.711,27
Jembrana	1.205.657,51	1.248.806,24	1.309.455,97	1.374.979,23	1.437.145,72	1.510.512,68	1.586.805,70	1.663.345,44

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010 (Data diolah)

Tabel 1.2
Jumlah PDRB per Kapita Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2002-2009 (Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Denpasar	6.420.299,03	7.391.726,52	7.594.417,66	7.255.872,55	7.568.683,28	7.949.763,77	8.398.163,61	8.851.177,90	
Buleleng	3.943.648,33	3.857.909,61	4.047.949,93	4.339.172,47	4.505.719,76	4.700.320,75	4.921.433,70	5.168.247,29	
Karangasem	3.423.440,79	3.294.768,84	3.435.910,19	3.808.877,51	3.957.780,33	4.128.791,00	4.317.669,55	4.514.673,16	
Bangli	3.910.900,26	3.819.988,09	3.947.454,77	4.161.501,87	4.276.299,66	4.404.604,40	4.533.049,12	4.743.456,85	
Klungkung	5.649.891,04	5.586.606,33	5.846.698,50	6.221.567,30	6.473.040,91	6.767.194,73	7.071.598,12	7.382.865,73	
Gianyar	5.545.879,77	5.505.984,88	5.704.075,22	6.051.504,13	6.281.044,63	6.562.892,80	6.882.677,86	7.223.660,18	
Badung	10.600.672,55	9.565.602,07	9.908.606,87	11.117.063,75	11.406.435,35	11.908.409,89	12.484.863,63	13.031.483,29	
Tabanan	4.249.968,02	4.233.661,53	4.413.338,51	4.747.510,13	4.938.687,15	5.163.310,06	5.390.253,25	5.641.525,75	
Jembrana	5.104.219,63	4.966.143,23	5.188.820,66	5.552.443,03	5.729.880,53	5.946.947,12	6.191.397,70	6.434.879,02	

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010 (Data diolah)

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2002-2009 (dalam persen)

Kab / Kota	Tahun									Rata-rata
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Denpasar	2,65	15,13	2,74	-4,46	4,31	5,03	5,64	5,39	4,54	
Buleleng	2,96	-2,17	4,93	7,19	3,84	4,32	4,70	5,02	3,84	
Karangasem	1,89	-3,76	4,28	10,85	3,91	4,32	4,57	4,56	3,82	
Bangli	1,63	-2,32	3,34	5,42	2,76	3,00	2,92	4,64	2,67	
Klungkung	4,39	-1,12	4,66	6,41	4,04	4,54	4,50	4,40	3,98	
Gianyar	1,82	-0,72	3,60	6,09	3,79	4,49	4,87	4,95	3,61	
Badung	1,84	-9,76	3,59	12,20	2,60	4,40	4,84	4,38	3,00	
Tabanan	3,19	-0,38	4,24	7,57	4,03	4,55	4,40	4,66	4,03	
Jembrana	1,78	-2,71	4,48	7,01	3,20	3,79	4,11	3,93	3,20	

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010 (Data diolah)

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan tiap-tiap Kabupaten/Kota sangat berbeda. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat dari PDRB per kapita antar Badung (PDRB per kapita tertinggi) dengan karangasem (PDRB per kapita terendah). Pada sebaran PMDN dan PMA di Provinsi Bali juga dirasa kurang merata dan masih terpusat di Kabupaten Badung. Rentangan nilai perbedaannya sangat jauh antara wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perkembangan pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali?
- 2) Bagaimana pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali?
- 3) Apakah hipotesis Kuznets tentang "U terbalik" berlaku di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.
- 3) Untuk mengetahui apakah hipotesis Kuznets tentang “U terbalik” berlaku di Provinsi Bali.

Landasan Teori

Pembangunan Ekonomi

Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditujukan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Bruto atau GDP). Namun demikian cara tersebut memiliki kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Pada saat terjadi pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, terjadi pola pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu pertambahan kegiatan ekonomi ini digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila pertambahan GDP / GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan perkapita akan tetap sama atau cenderung menurun ini berarti bahwa pertambahan GDP / GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

Hipotesis Penelitian

Untuk menjawab pokok permasalahan dan mencapai tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis Kuznets tentang “U terbalik” berlaku di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Definisi Identifikasi Operasional Variabel

Definisi variabel atau konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah PDRB daerah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahunnya yang dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar yaitu tahun 2000. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita rata-rata Kabupaten yang menjadi nilai atau angka Provinsi Bali periode tahun 2002-2011 dalam satuan rupiah.
2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Bali periode 2002-2011 atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah perubahan PDRB setiap tahun secara total maupun masing-masing sektor di suatu wilayah, yang dihitung menurut harga konstan 2000 jangka waktu tertentu (satu tahun) dalam satuan persen. Adapun laju PDRB Perkapita yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase perubahan PDRB yang dihitung menurut harga tetap tahun 2000 di Provinsi Bali dari tahun 2002-2011 dalam satuan persen.

3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per kabupaten di Provinsi Bali periode 2002-2011 atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah persentase perubahan PDRB yang dihitung menurut harga tetap tahun 2000 per kabupaten di Provinsi Bali dari tahun 2002-2011 dalam satuan persen.
4. Jumlah Penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal / berdomisili serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di kabupaten yang ada di Provinsi Bali menjadi nilai atau angka Provinsi Bali pada tahun 2002-2011 dalam satuan jiwa/orang.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah:

Analisis Tipologi Klassen

Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan daerah yaitu empat daerah kuadran dibagi menurut klasifikasi daerah seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1

Tabel 4.1

Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Daerah

PDRB perkapita		
Laju Pertumbuhan	ydi > yni (+)	ydi < yni (-)
rdi > rni (+)	(I) Daerah maju dan tumbuh cepat	(II) Daerah berkembang cepat tapi tidak maju
rdi < rni (-)	(III) Daerah maju tapi tertekan	(IV) Daerah relatif tertinggal

Sumber: Sjafrizal 1997

Keterangan:

rdi = laju pertumbuhan kabupaten i

rni = laju pertumbuhan total PDRB Provinsi Bali

ydi = PDRB per kapita kabupaten i

yni = PDRB per kapita Provinsi Bali.

- a. Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) adalah kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi.
- b. Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi.
- c. Kuadran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.

- d. Kuadran IV (keempat) adalah daerah relatif tertinggal (*low growth and slow income*) adalah kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.

Analisis Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar Kabupaten yang terjadi di Provinsi Bali dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks ketimpangan regional ini diformulasikan (Sjafrizal, 1997) sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^n (Y_i - Y)^2 (f_i/n)}}{Y} \dots\dots\dots(4.1)$$

Keterangan:

- Y_i = PDRB per kapita di kabupaten i
- Y = PDRB rata-rata per kapita di Provinsi
- f_i = jumlah penduduk kabupaten i
- n = jumlah penduduk Provinsi

Formula indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dan jumlah penduduk dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau (0 < W < 1). Dengan indikator bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol maka akan menunjukkan ketimpangan yang makin lebar.

Regresi Non Linier

Untuk menguji hipotesis Kuznets dapat digunakan Regresi Non Linier. Regresi non linier model kuadratik merupakan hubungan antara dua peubah yang terdiri dari variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) sehingga akan diperoleh suatu kurva yang membentuk garis lengkung menaik ($\beta_2 > 0$) atau menurun $\beta_2 < 0$ (Steel dan Torrie, 1980). Dalam hal ini pembuktian kurva U terbalik dilakukan dengan menghubungkan antara angka Indeks Williamson dengan pendapatan per kapita Provinsi Bali. Untuk itu digunakan *Regression Curve Estimation* dengan persamaan sebagai berikut:

$$IW = \alpha + \beta_1 Y + \beta_2 Y^2 + \epsilon \dots\dots\dots(4.2)$$

Keterangan:

- IW = Angka Indeks Williamson
- α = Konstanta
- $\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi
- Y = PDRB per Kapita
- Y² = PDRB per kapita dikuadratkan
- ϵ = Residu

HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Analisis Tipologi Klassen di Provinsi Bali

Dikatakan “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dan digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Perkembangan PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB untuk tiap kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2002-2011, beserta rata-ratanya untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Berdasarkan data pada Lampiran 1 dan Lampiran 2, kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi sesuai dengan Tipologi Klassen sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Menurut Tipologi Klassen

PDRB perkapita Laju Pertumbuhan	ydi > yni (+)	ydi < yni (-)
	rdi > rni (+)	(I) Daerah maju dan tumbuh cepat - Badung
rdi < rni (-)	(III) Daerah maju tapi tertekan - Klungkung	(IV) Daerah relatif tertinggal - Karangasem - Bangli - Tabanan - Jembrana

5.2.2 Analisis Ketimpangan Pembangunan

Setelah dilakukan perhitungan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Bali, dapat dilihat bahwa pada tahun 2002-2011 nilai indeks ketimpangan Kabupaten/Kota di Bali berkisar pada nilai 0,6626 sampai dengan 0,8614. Indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan terendah terjadi pada tahun 2009. Sehingga rata-rata indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah 0,8428, seperti pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2

Indeks Williamson di Provinsi Bali

Tahun	Indeks Williamson
2002	0.8219
2003	0.8307
2004	0.8526
2005	0.8614
2006	0.8312
2007	0.6790
2008	0.6721
2009	0.6626
2010	0.6803
2011	0.6933
Rata-rata	0.8428

Sumber: Data Diolah, 2013

5.2.3 Uji Hipotesis U terbalik di Provinsi Bali

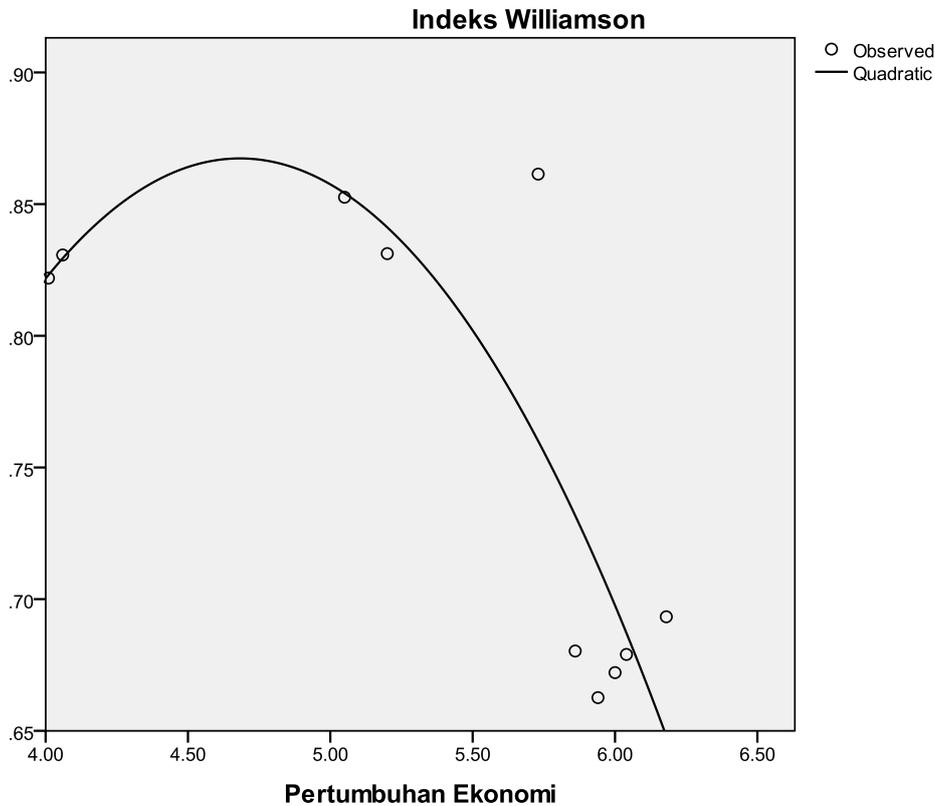
Dari hasil perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Bali menunjukkan perubahan yang tidak begitu signifikan. Lebih jauh akan dibahas hubungan antara ketimpangan dengan PDRB Per Kapita dalam rangka menguji berlakunya Kuznets di Provinsi Bali.

Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara PDRB Per Kapita dengan indeks ketimpangan. Berikut adalah data PDRB Per Kapita dan Indeks Williamson di Provinsi Bali.

Tabel 5.3
Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Williamson

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Williamson
2003	4.06	0.8219
2004	5.05	0.8307
2005	5.73	0.8526
2006	5.20	0.8614
2007	6.04	0.8312
2008	6.00	0.6790
2009	5.94	0.6721
2010	5.86	0.6626
2011	6.18	0.6803
Rata-rata	5.56	0.8428

Sumber: Data Diolah, 2013



Gambar 5.1
Hubungan Indeks Williamson dengan Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 5.1 memperlihatkan hubungan antara indeks ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan bentuk U terbalik, dengan persamaan regresi :

$$IW = 0,111 - 1,301.10^{-8} Y + 8,767.10^{-16} Y^2$$

Hal ini berarti bahwa, pada masa awal pertumbuhan terjadinya pertumbuhan ekonomi disertai dengan ketimpangan yang meningkat, pada masa berikutnya ketimpangan akan semakin menurun. Dengan melihat kurva tersebut, menunjukkan bentuk U terbalik. Hal ini berarti bahwa hipotesis Kuznets berlaku di Provinsi Bali pada periode tahun 2002-2011.

Pembahasan

Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Menurut tipologi klassen, dari empat jenis tipologi pola dan struktur ekonomi, Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbagi dalam empat pola dan struktur, yaitu :

1. Daerah yang maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung;
2. Daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng;
3. Daerah maju tapi tertekan, yaitu Kabupaten Klungkung; dan
4. Daerah tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem.

Kabupaten Badung memang merupakan daerah yang paling maju di Provinsi Bali, karena merupakan pusat perkembangan daerah tujuan wisata, sehingga daerah ini menjadi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Provinsi Bali.

Sedangkan untuk Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Buleleng merupakan daerah yang berkembang dengan pesat. Buleleng merupakan salah satu daerah pusat pendidikan, sedangkan Gianyar merupakan daerah industri kerajinan yang berkembang dengan pesat.

Hasil pengujian statistik antara struktur ekonomi dengan ketimpangan pendapatan menunjukkan hubungan negatif yang signifikan. Hal ini berarti bahwa dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB menyebabkan ketimpangan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya. Temuan ini sesuai dengan pendapat dari Todaro (2000) yang menyatakan bahwa ketimpangan pada sektor modern yang tengah mengalami pertumbuhan pesat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor tradisional yang relatif stagnan dan konstan.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Yustika (2005) akibat dukungan pemerintah terhadap sektor industri yang berlebihan, muncul perbedaan efisiensi dan produktivitas antara sektor industri dan sektor lainnya (misalnya sektor pertanian) sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sektoral, yang dalam penilaian mikro sekaligus juga menunjukkan ketimpangan pendapatan antara pelaku ekonomi yang bekerja di sektor industri dan pelaku ekonomi yang bekerja di sektor pertanian. Ketimpangan pendapatan juga bisa diperiksa dari sisi lain, bahwa ketika industrialisasi dijalankan, faktor produksi yang paling berkuasa adalah modal, lebih-lebih jika hal ini direlasikan dengan negara yang memakai sistem kapitalis. Akibat dominasi modal dibandingkan faktor produksi yang lain, setiap tetes penghasilan ekonomi yang diperoleh dari proses produksi sebagian besar akan jatuh pada pemilik modal secara tidak proporsional.

Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Bali

Tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi salah satunya dapat diukur melalui Indeks Williamson yang bernilai antara 0-1. Semakin besar nilai Indeks Williamson, berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi di suatu wilayah.

Indeks Williamson di Provinsi Bali berkisar pada 0,68081 sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan tinggi. Hal ini disebabkan pembangunan terpusat pada daerah-daerah yang telah maju, seperti Kabupaten Badung, sehingga tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Bali termasuk tinggi.

Faktor perencanaan dan manajemen pembangunan yang baik akan menyebabkan kawasan menjadi kawasan ekonomi strategis seperti halnya Negara kecil Singapura. Merujuk pada wilayah Indonesia yang kepulauan menyebabkan adanya ketimpangan-ketimpangan di sector-sektor tertentu. Ketimpangan tersebut menyakibatkan arus urbanisasi meningkat, ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan SDM, ketidakmerataan penggunaan teknologi, dan aksesibilitas yang kurang memadai.

Hipotesis Kuznets tentang “U terbalik” di Provinsi Bali

Hipotesis Kuznets yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi yang berbentuk kurva U terbalik ternyata tidak berlaku di Provinsi Bali pada periode pengamatan tahun 2002-2011. Hal ini terbukti dari hasil analisis trend menggunakan indeks Williamson. Bagian dari Hipotesis Kuznets yang terjadi di Provinsi Bali pada penelitian adalah kurva Kuznets dengan pertumbuhan ekonomi menurun di awal kemudian menaik dan indeks Williamson berbentuk U.

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara PDRB per kapita dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Meskipun secara linier hubungan tersebut dinyatakan positif, namun dalam Gambar 4.1 terlihat sedikit melengkung ke bawah. Temuan ini sesuai dengan pendapat Kuznets (dalam Sukirno, 1985) mengatakan bahwa proses pembangunan ekonomi suatu negara pada tahap awal umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, dan baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih baik pada tahap pembangunan lebih lanjut. Hubungan peningkatan pendapatan per kapita dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang selanjutnya menurun yang dikenal dengan hipotesis U terbalik dari Kuznets.

Adanya hubungan positif antara PDRB per kapita dengan ketimpangan pendapatan, hasil penelitian ini sesuai Arisudi (1997) dalam tulisan yang berjudul Disparitas pendapatan dan perkembangan pengukuran kemiskinan di Indonesia : suatu tela'ah terhadap fenomena Kuznet yang menyimpulkan bahwa distribusi ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak kunjung membaik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sinung Noegroho dan Soelistianingsih (2007) bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbagi dalam empat pola yaitu : perekonomian Daerah yang maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung; daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng; daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Klungkung; dan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem.

2. Indeks Williamson di Provinsi Bali berkisar pada nilai 0,8428 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali tinggi.
3. Hipotesis Kuznets tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U terbalik tidak berlaku di Provinsi Bali.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan pendapatan per kapita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa selalu diharapkan, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan, kepada pemerintah dianjurkan untuk memberikan subsidi lebih banyak kepada masyarakat secara langsung berupa “pembayaran transfer”, dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya.
2. Pengujian hipotesis kuznets menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyebabkan ketimpangan meningkat, sehingga pemerintah perlu melaksanakan upaya pemerataan pembangunan, khususnya di daerah lain selain Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta*
- _____. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 17, No 1, 2002, 27-45
- Aryani, Ketut Trisna. 2010. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Kontribusi Sektor Jasa terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Barro, Robert. J. 1999. *Inequality, Growth and Investment*. NBER Working Paper Series (Working Paper 7038).
- Brata, Putu Agus Ari. 2009. “Analisis Pengaruh Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten dan Inflasi serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali” (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Brodjonegoro, Bambang. 2003. Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah. In: Suasta, Putu dan Syarofuddin Imfath, editors. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Konsep dan Pelaksanaannya di Bali)*. Denpasar: Wijaya Words. P. 211-214
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali 2005-2009*. BPS Bali
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta